

## ABSTRAK

Kabupaten Gunungkidul menduduki peringkat teratas potensi kerawanan politik uang dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta menjelang pemilu tahun 2019. Bawaslu Gunungkidul sebagai badan pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan umum di kabupaten menjadi lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menghentikan praktik politik uang. Upaya yang dilakukan adalah dengan sosialisasi program Desa Antipolitik Uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Bawaslu Gunungkidul dalam sosialisasi Desa Antipolitik Uang di Kabupaten Gunungkidul serta menemukan faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta triangulasi sumber sebagai uji keabsahan data. Teori yang digunakan adalah Teori Perencanaan Charles Berger. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan Bawaslu Gunungkidul dalam sosialisasi Desa Antipolitik Uang dengan pemilihan komunikator berdasarkan kredibilitas sumber, penyusunan pesan *one side issue*, metode penyampaian dalam bentuk isi pesan yaitu informatif, edukatif dan persuasif, juga metode penyampaian dari cara pelaksanaannya yaitu *canalizing*, terakhir penggunaan saluran komunikasi tatap muka dan media nirmassa berupa spanduk, stiker dan brosur. Strategi komunikasi yang dilakukan cukup berhasil merubah perilaku masyarakat sesuai dengan hasil yang diinginkan, yaitu tidak adanya laporan aktivitas *money politic* yang ditemukan selama masa tenang kampanye. Namun masih terdapat beberapa hal yang luput dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung dalam penerapan strategi komunikasi ini antara lain kerja sama berbagai pihak *stakeholders* maupun pemerintah (Pemerintah Desa, Kecamatan), peran Panwascam, Kepala Desa dan juga masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain keterbatasan anggaran dana dan pola pikir pesimisme masyarakat terhadap keberhasilan mencegah politik uang.

Kata kunci: strategi komunikasi, sosialisasi, Desa Antipolitik Uang

## **ABSTRACT**

*Gunungkidul District is ranked as the top potential for money political vulnerability compared to other districts/cities throughout Special Region of Yogyakarta ahead of 2019 election. Election Supervisory Board of Gunungkidul as a supervisory board in organizing general elections in the district becomes an institution that has the authority and responsibility to stop the practice of money politics. Efforts are being made to promote the Anti-Money Politic Village's program. This study aims to find out how the communication strategy carried out by the Election Supervisory Board of Gunungkidul in the socialization of Anti-Money Politic Village in Gunungkidul District and to find supporting and inhibiting factors. This type of research is a qualitative descriptive study with data collection techniques using literature study, interviews, observation and documentation. As well as triangulation of sources as a test of the validity of the data. The theory used is Charles Berger's Planning Theory. The results of this study indicate that the communication strategy undertaken by the Election Supervisory Board of Gunungkidul in the socialization of the Anti-Money Politic Village with the selection of communicators based on source credibility, composing one side issue messages, delivery methods in the form of message content that is informative, educative and persuasive, as well as the delivery method of the implementation using canalizing method, the last using face-to-face communication channels and non-mass media in the form of banners, stickers and brochures. The communication strategy that was carried out was quite successful in changing people's behavior in accordance with the desired results, namely the absence of reports of money political activities found during the campaign quiet period, but there are still some things that missed in its implementation. Supporting factors in the implementation of this communication strategy include the cooperation of various stakeholders and the government (Village Government, Districts), the role of District Election Supervisory Committee, the Village Head and also the villagers. While the inhibiting factors include limited budget funds and the pessimism mindset of the villagers toward the success in preventing money politics.*

*Keywords: communication strategy, socialization, Desa Antipolitik Uang*